

PERAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH TERHADAP KASUS TUBERKULOSIS DI DKI JAKARTA

**Morina Caroline Parhusip¹,
Sahadi Humaedi².**

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Padjadjaran

Article history

Received : 20 September 2024

Revised : 13 November 2024

Accepted : 14 Agustus 2025

*Corresponding author

Email :

¹morina21001@mail.unpad.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v8i1.57966

ABSTRAK

Permasalahan kasus Tuberkulosis di Jakarta memerlukan kolaborasi multisektor dalam penanganannya. Kolaborasi antara pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah (LNP) menjadi kunci untuk mencapai target eliminasi TBC 2030. Penelitian ini menganalisis peran aktif Lembaga non pemerintah dalam penanganan kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta dengan menggunakan kerangka konseptual peran Raharjo. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa lembaga non pemerintah berperan signifikan dalam pendanaan, penyediaan layanan kesehatan berbasis komunitas, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Fleksibilitas, kedekatan dengan komunitas, dan pendekatan partisipatif menjadi keunggulan lembaga non pemerintah dalam menjangkau kelompok marginal yang rentan terhadap Tuberkulosis.

Kata kunci: Tuberkulosis, lembaga non pemerintah, kolaborasi multisektor, DKI Jakarta

ABSTRACT

The tuberculosis problem in Jakarta requires a multi-sectoral collaboration in its handling. Collaboration between the government and Non-Governmental Organizations (NGOs) is key to achieving the 2030 TB elimination target. This study analyzes the active role of NGOs in handling tuberculosis cases in DKI Jakarta using Raharjo's conceptual framework of roles. Through a qualitative descriptive approach and literature review, this study found that NGOs play a significant role in funding, providing community-based health services, policy advocacy, and community empowerment. Flexibility, closeness to the community, and a participatory approach are the strengths of NGOs in reaching marginalized groups vulnerable to tuberculosis.

Keyword: Tuberculosis, non-governmental organization, multi-sector collaboration, Jakarta.

PENDAHULUAN

Kasus tuberkulosis di Indonesia menjadi permasalahan yang masih belum tertangani sepenuhnya. Indonesia menjadi negara ke-2 dengan angka kasus tertinggi pasien pengidap tuberkulosis di seluruh

dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di tahun 2023 jumlah kasus pasien TBC yang terdata adalah sebanyak 821.200 ribu kasus. Kasus tuberkulosis yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan

peningkatan yang signifikan (sumber tbindonesia.or.id). Hal ini menunjukkan bahwa Tuberkulosis masih menjadi permasalahan yang harus mendapatkan solusi konkrit dalam penanganannya.

Dalam mengatasi kasus Tuberkulosis (TB) di Indonesia, pemerintah menerapkan sejumlah langkah dan strategi yang dirancang untuk memerangi penyebaran TB. Strategi ini tertuang dalam Strategi Nasional Eliminasi Tuberkulosis yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Beberapa pendekatan yang diambil meliputi peningkatan komitmen, perluasan akses terhadap layanan TB, penguatan promosi dan pencegahan TB, penanganan dan pengendalian infeksi TB, serta pemanfaatan hasil penelitian. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan WHO untuk mencapai target eliminasi TB pada tahun 2030. Beberapa program diluncurkan sebagai bentuk usaha pemberantasan kasus Tuberkulosis yang dibentuk oleh pemerintah, seperti imunisasi, TOSS TBC (Temukan, Obati, Sampai Sembuh), dan juga pendekatan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis). Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan mengenai fasilitas dan sistem informasi tbc guna mempercepat akses alat dan obat-obatan yang dibutuhkan. Pasien yang terkena TBC pun diberikan prioritas dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga pasien segera mendapatkan perawatan yang optimal.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus TBC yang tinggi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah kasus Tuberkulosis yang tercatat dari bulan Januari hingga Juli 2024 mencapai 30 ribu kasus. Pada tahun 2020, angka kasus TBC di Jakarta mencapai 25.646 kasus, kemudian di tahun 2021 jumlah kasus TBC di Jakarta tercatat sebesar 28.390, tahun 2022 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 40.454 kasus, dan di tahun

2023, kasus TBC yang tercatat mencapai 60.420 kasus. Hal ini membuktikan bahwa penularan TBC di DKI Jakarta masih terbilang masif. Tingginya angka kasus TBC di Jakarta dipengaruhi beberapa hal, yaitu padatnya penduduk yang meningkatkan resiko penularan, stigma sosial yang membuat pasien yang terpapar takut mendapatkan pengobatan, pandemi Covid-19, faktor kemiskinan, dan keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2022).

Di DKI Jakarta, dinas kesehatan DKI Jakarta telah mengupayakan beberapa hal dalam menangani kasus TBC yang terjadi di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan TBC di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah merancang strategi komprehensif. Strategi ini meliputi upaya pencegahan, deteksi dini, surveilans, pengobatan, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah TBC di wilayah Jakarta. Lebih lanjut, upaya dinkes DKI merespons tingginya kasus TBC di Jakarta adalah membuat perancangan Kampung Siaga TBC di 267 RW di 267 kelurahan di Jakarta, pemberian TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) di 42 fasilitas kesehatan Jakarta yang terpilih, koordinasi dengan berbagai pihak, dan pelaksanaan sosialisasi TBC kepada masyarakat (Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2024).

Akan tetapi, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tentunya perlu diiringi dengan berbagai pihak terlebih sektor kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Dalam menghadapi kasus Tuberkulosis di Indonesia, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan menggunakan konsep Intervensi Big Chain Hospitals yaitu suatu konsep inovasi untuk meningkatkan peran dan kontribusi fasilitas kesehatan swasta yang turut dimuat dalam program penuntasan TBC nasional. Konsep ini dibuat agar pelayanan TBC dapat berlangsung maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kolaborasi

ini dilakukan antara Fasilitas kesehatan swasta dengan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka eliminasi TB 2030.

Selain rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) juga memiliki peran penting dalam upaya penuntasan Tuberkulosis (Kemenkes RI, 2018). Kontribusi yang dilakukan adalah penyuluhan seputar TBC kepada masyarakat seperti gejala dan pencegahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi stigma yang tersebar di masyarakat seputar TBC. Dalam hal pengobatan dan pengendalian, Puskesmas juga menyediakan layanan yang penting bagi pasien TBC yang sudah disembuhkan. Layanan ini tidak hanya memberikan pengobatan yang diperlukan tetapi juga mengendalikan kondisi pasien untuk mencegah penyakit TBC dari menjadi lebih berbahaya.

Tuberkulosis tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tuberkulosis juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi seseorang (Kemenkes RI, 2018). Hal ini membuat penanganannya membutuhkan dukungan dari berbagai sektor di Indonesia. Selain dari pihak pemerintah rumah sakit dan puskesmas yang berada dalam sektor kesehatan, terdapat organisasi dan lembaga non pemerintah yang turut berperan aktif dalam upaya penuntasan kasus Tuberkulosis di Indonesia. Lembaga non pemerintahan yang merupakan terjemahan dari *NGO (Non Government Organization)* dapat dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat. Thomas Wolf dalam Wibhawa dkk (2010:126) mengemukakan bahwa lembaga non-profit atau lembaga pelayanan manusia diatur dan dikelola dengan baik secara sungguh-sungguh pada berbagai bidang. Dalam menangani kasus TBC, kemitraan lintas sektor dalam pengendalian TBC menjadi kunci dalam upaya eliminasi penyakit ini. Pemerintah berperan vital dalam merumuskan kebijakan serta memantau implementasi program kesehatan, sementara lembaga non-profit lebih luwes dan terjun langsung dalam

upaya advokasi serta penyuluhan kepada masyarakat. Kerja sama yang terintegrasi antara kedua entitas ini mampu meningkatkan efektivitas program pengendalian TBC.

Dalam laporan tahunan *WHO Global Tuberculosis Report*, peranan lembaga non pemerintah untuk mendampingi pemerintah dalam penuntasan kasus TBC dapat meningkatkan akses layanan terkait pendidikan dan kesehatan serta mempercepat deteksi kasus dan pengobatan TB. WHO juga menekankan hal ini dalam dokumen strategis seperti *End TB Strategy 2016-2035*, yang memperkuat peran NGO dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di tingkat komunitas, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Singh et al. (2017) mengemukakan bahwa lembaga non pemerintah dapat mengatasi hambatan struktural yang dihadapi oleh sistem kesehatan pemerintah dan memimpin kampanye kesadaran di tingkat komunitas. lembaga non-pemerintah sering kali menjadi fasilitator kunci dalam penyuluhan, penyediaan layanan, advokasi kesehatan terkait TBC.

Dalam artikel ini, penulis akan menjabarkan mengenai pentingnya peranan lembaga non pemerintahan dalam membantu pemerintah menuntaskan kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta. Penulis menggunakan konsep peran menurut Raharjo (Rahardjo, 1999: 165-166) yaitu: (1) Sebagai kekuatan pengimbang (2) Sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat; dan (3) Sebagai lembaga perantara. Topik peranan lembaga non pemerintahan dalam menangani kasus Tuberkulosis khususnya di DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan urgensi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai kasus tuberkulosis di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman pentingnya peran lembaga non pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan seperti tuberkulosis

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur yang diambil dari artikel dan jurnal yang tersedia di Google Scholar. Dalam artikel ini, penulis melakukan analisis terhadap artikel dan jurnal yang membahas studi tentang penanganan kasus Tuberkulosis di Indonesia yang berfokus pada peranan lembaga non pemerintah. Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Fink (2010) menyebutkan bahwa tinjauan literatur adalah metode yang sistematis dan terorganisir untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil dari penelitian yang telah dipublikasikan terkait topik tertentu. Tinjauan ini bertujuan untuk menyusun ringkasan informasi yang relevan dan mengidentifikasi celah atau kebutuhan penelitian lebih lanjut. Dengan melakukan tinjauan literatur secara mendalam, peneliti dapat memperdalam pemahaman, membangun fondasi yang kokoh, dan menemukan gagasan baru yang berpotensi menghasilkan temuan penting.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah penggunaan data yang sudah ada, seperti hasil survei, catatan administratif, atau penelitian sebelumnya. Metode ini membantu peneliti menghemat waktu dan sumber daya karena data telah tersedia dan dapat dianalisis ulang untuk menjawab pertanyaan baru (Hox dan Boeije, 2005).

Melalui artikel ini, penanganan pasien Tuuberkulosis yang melibatkan peranan lembaga non pemerintah akan mengadopsi menurut Raharjo (Rahardjo, 1999: 165-166) yaitu: (1) Sebagai kekuatan pengimbang (2)

Sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat; dan (3) Sebagai lembaga perantara.

Ruang lingkup permasalahan mencakup berbagai aspek, seperti menurut World Health Organization (2020), Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah resistensi terhadap obat, akses terbatas terhadap perawatan yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang rendah mengenai pencegahan dan pengobatan. Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk juga memperparah penyebaran penyakit ini. Selain itu, Permasalahan utama TB terletak pada diagnosis yang terlambat dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan, yang dapat menyebabkan penyebaran infeksi yang lebih luas. Selain itu, stigma sosial terhadap TB seringkali menghalangi pasien untuk mencari bantuan medis (Murray et al., 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Tuberkulosis sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurut *Organisasi Kesehatan Dunia* (WHO), TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Tuberkulosis menyebar antar manusia melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi TB paru atau TB laring batuk, bersin, atau berbicara, mengeluarkan *droplet nucleus* berukuran kurang dari 5 mikron. Kontak dekat yang berkepanjangan dengan orang yang terinfeksi meningkatkan risiko penularan. Jika terinfeksi, apakah paparan tersebut berkembang menjadi penyakit TB aktif tergantung pada kondisi kekebalan individu.

Dampak tuberkulosis tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik seseorang, tetapi juga berdampak pada kondisi mental pasien. Hal ini disebabkan oleh proses pengobatan yang memakan waktu lama dan harus dilakukan secara konsisten selama minimal enam bulan. Penanganan

tuberkulosis menghadapi berbagai tantangan, seperti pasien yang enggan menerima pengobatan, individu yang terinfeksi namun tidak melaporkan kondisinya, penyebaran penyakit yang cepat, serta ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan. Oleh karena itu, Strategi terbaru dalam mencegah dan mengendalikan TB berfokus pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penyebaran penyakit ini. Pendekatan ini membutuhkan dedikasi yang tinggi dan partisipasi aktif dari semua bagian masyarakat. Utamanya adalah memastikan bahwa setiap orang yang terjangkit Tuberkulosis dapat terdeteksi, didiagnosis dengan benar, dan mendapatkan perawatan hingga sembuh.

DKI Jakarta sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia, menyumbang angka yang besar terhadap kasus Tuberkulosis yang terjadi di Indonesia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan bahwa penanganan tuberkulosis memerlukan komunitas dan lembaga swasta untuk menangani kasus Tuberkulosis yang terjadi. Sebagai salah satu contoh, penelitian yang dilakukan oleh Lusianne (2020) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan terkait kepatuhan minum obat dalam keberhasilan pengobatan kasus Tuberkulosis. Konsistensi minum obat yang dilakukan oleh pasien tuberkulosis harus memerlukan pendampingan agar dapat menunjang keberhasilan pengobatan. Dalam hal ini, pemerintah memerlukan kerjasama terhadap lembaga non pemerintah terhadap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah.

Peranan Lembaga Non-Pemerintah dalam menangani kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta Sebagai Kekuatan Pengimbang

Dalam konsep ini, peran suatu lembaga atau organisasi non-pemerintah berfungsi sebagai kekuatan yang menyeimbangkan antara kekuatan-

kekuatan besar, seperti pemerintah atau sektor swasta. Kekuatan pengimbang bertugas memastikan bahwa kepentingan masyarakat, terutama kelompok marginal atau rentan, tetap diperhatikan dalam kebijakan atau program pembangunan. Lembaga ini bertindak untuk mengontrol atau mengawasi agar tidak terjadi dominasi satu pihak, sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih merata.

Dalam kasus penanganan TBC, seringkali implementasi dari kebijakan atau program yang telah dibuat pemerintah tidak merata. Dalam kasus TBC yang terjadi di DKI Jakarta, dinas kesehatan DKI Jakarta dalam laporan kesehatan menyebutkan bahwa penanganan kasus tuberkulosis memiliki program terkait akses layanan kesehatan yang menyeluruh terutama di daerah kumuh di Jakarta. Dalam hal ini, Lembaga non pemerintah hadir sebagai penyeimbang, memantau jalannya kebijakan, dan memastikan bahwa program dijalankan dengan adil dan merata. Salah satu lembaga non pemerintah yang menjalankan konsep peran ini adalah Komunitas Peduli TBC. Berbagai komunitas lokal di Jakarta juga berperan aktif dalam penanggulangan TBC dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan pengobatan TBC. Mereka sering kali bekerja sama dengan LNP dan pemerintah untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan yang terdampak oleh penyakit ini. Selain itu, lembaga The Global Fund Indonesia juga bekerjasama dengan lembaga di Indonesia termasuk Jakarta. Mereka memberikan pendanaan, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk program-program yang bertujuan meningkatkan akses pengobatan dan pencegahan TBC.

Sebagai Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

Peran ini menekankan pada upaya untuk membangun kekuatan dan kapasitas masyarakat, terutama melalui pendidikan, penyuluhan, dan peningkatan keterampilan. Lembaga yang mengambil

peran ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan mampu mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi, seperti kemiskinan, kesehatan, atau lingkungan. Dengan memberdayakan masyarakat, lembaga tersebut tidak hanya membantu mereka dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan mereka kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Ini bisa berupa program-program pelatihan, advokasi, atau pengembangan komunitas yang memberikan masyarakat alat dan pengetahuan untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri.

Dalam memerangi kasus TBC yang terjadi di DKI Jakarta, peran lembaga non pemerintah sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Berbagai lembaga non pemerintah seringkali menjalankan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi dan bahaya dari Tuberkulosis. Mereka mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini, pengobatan rutin, dan pencegahan penularan. Melalui kampanye edukasi dan penyuluhan, LNP membantu masyarakat untuk memahami bagaimana cara melindungi diri dari TBC dan memberdayakan mereka agar lebih proaktif dalam menjaga kesehatan keluarga dan komunitas.

Dalam konteks gerakan pemberdayaan masyarakat, Yayasan KNCV TB Foundation berfokus pada peningkatan kapasitas komunitas lokal. seperti memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan relawan lokal, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengobatan TBC secara lengkap (Septiani dkk, 2021). Selain itu lembaga Stop TB Partnership (STPI) juga lembaga yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang TBC, serta melakukan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap pasien TBC. STPI juga berperan dalam menggalang kemitraan antara

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030 (tbindonesia, 2024).

Sebagai lembaga perantara

Sebagai lembaga perantara, lembaga non pemerintah memainkan peran vital dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat yang terdampak TBC dan pemerintah. Mereka sering kali menjadi penghubung yang membawa aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, lembaga non pemerintah juga berperan dalam menyebarkan program-program dan kebijakan pemerintah terkait penanganan TBC kepada masyarakat. lembaga non pemerintah dapat membantu mendistribusikan obat-obatan, menginformasikan tentang program deteksi tuberkulosis, atau mendampingi pasien dalam mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan menjadi fasilitator yang efektif, lembaga non pemerintah membantu memastikan bahwa program pemerintah berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.

Adapun lembaga yang membantu pemerintah DKI Jakarta adalah Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). Sebagai lembaga perantara, LKNU memainkan peran penting dalam menjembatani program-program pemerintah terkait pengobatan dan pencegahan TBC kepada masyarakat melalui jaringan pesantren, masjid, dan organisasi keagamaan. LKNU juga mengadvokasi akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan bagi komunitas yang rentan. Selain itu terdapat lembaga Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia. Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat (Alfian dkk, 2021).

SIMPULAN

Kolaborasi multi-sektor antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah (LNP) memiliki dampak signifikan dalam upaya eliminasi TBC, khususnya di Jakarta. Lembaga non pemerintah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang rentan dan sulit dijangkau oleh pemerintah, serta berperan dalam memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya dan pencegahan TBC. Sinergi antara kedua pihak meningkatkan efektivitas program edukasi dan pengobatan, yang berdampak langsung pada peningkatan deteksi dini dan kepatuhan pengobatan. Tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan dan stigma sosial, dapat diminimalkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat luas. Dengan demikian, kolaborasi multi-sektor menjadi strategi yang efektif dalam mempercepat pengendalian dan pemberantasan TBC di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. S. (2021). *Analisis Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Utara Kota Administrasi Jakarta Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Aisyah, S., Savitri, F., Tuahuns, F., & Sari, P. E. (2023). EDUKASI TUBERKULOSIS (TB) KEPADA KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELURAHAN DUREN SAWIT. *Jurnal Bakti Untuk Negeri*, 3(2), 123-133.
- Alfian, D., Susanti, N., Amalia, R., & Alhidayati, A. (2021). Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dalam Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis. *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*, 7(1), 57-63.
- Aidillah, M. R., Sumarni, S., & Sari, D. I. P. (2022). Sosialisasi Upaya Eliminasi Tuberculosis Melalui Peran Komunitas. *Abdimas Medika*, 3(1), 52-55.
- Bachtiar, F. R. (2022). KEMITRAAN INDONESIA DAN GLOBAL FUND DALAM MENGATASI PENYAKIT TBC DI INDONESIA. *Review of International Relations*, 4(2), 109-131.
- Baresi, W. Y. (2023). *Peran World Health Organization (WHO) dalam Menangani Tuberkulosis (TBC) di Indonesia (Studi Kasus: Penanganan Dinas Kesehatan Kota Salatiga terhadap Kasus TBC) tahun 2017-2021* (Doctoral dissertation).
- Berhitu, C. A., Purnomo, D., & Suwartiningsih, I. S. (2024). PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENAGGULANGAN HIV/AIDS PADA KELOMPOK USIA PRODUKTIF DI KOTA JAYAPURA TAHUN 2023. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7).
- Ernirita, E., Mujiastuti, R., Awaliah, A., Zuryati, M., Widiastuti, E., Idriani, I., ... & Tazkiya, S. (2023). Pemberdayaan Kemandirian Warga Sekolah Sehat dan Peduli TBC dalam Gerakan Bersama (Geber) Melawan Tuberkulosis. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 160-172.
- Fitriani, D., & Sulistiadi, W. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Investigasi Kontak Pasien Tuberkulosis Di Puskesmas Jatinegara, Jakarta Timur. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 2178-2187.
- Hamidah, H., & Duku, S. (2023). Strategi Komunikasi (MSS) Masyarakat Sehat Sriwijaya Banyuasin Dalam Menyebarkan Program Eliminasi TBC Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(2), 463-468.
- Hasanah, K., & Sagita, V. A. (2020). Pendampingan Pasien Tuberkulosis Resisten Obat (TBC-RO) Melalui Strategi Komunikasi Interpersonal

- Organisasi Mantan
Pasien. *PROMEDIA (Public Relation
Dan Media Komunikasi)*, 6(1).
- Ihlasuyandi, E., & Ediyono, S. (2022).
ANALISIS PROGRAM
COMMUNITY TB CARE
'AISYIYAH DALAM PERSPEKTIF
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT. *Jurnal Kesehatan
Siliwangi*, 3(2), 188-195.
- Septiani, D., Haniifah, F. N., Riswaluyo, M.
A., & Anwar, N. M. (2022).
Penggabungan Aplikasi
Telemedicine TB Sebagai
Optimalisasi Pelayanan TB Selama
Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal
Biostatistik, Kependudukan, dan
Informatika Kesehatan*, 2(2), 116-124.
- Siahaineinia, H. E., & Sinaga, S. N. (2020).
Pengaruh Pengetahuan Tentang
Tuberkulosis (Tb) Terhadap Tingkat
Kecemasan Pada Pasien Tb Paru Di
Rumah Sakit Tria Dipa Jakarta
Tahun 2019. *Excellent Midwifery
Journal*, 3(1), 26-34.
- Siregar, S. K. (2024). Kolaborasi Pemerintah
dan Lembaga Non-Profit dalam
Kampanye Eliminasi Tuberkulosis:
Pendekatan Advokasi kepada
Masyarakat di Surabaya. *Socius:
Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu
Sosial*, 1(11).

https://tbindonesia.or.id/pustaka_tbc/peraturan-presiden-nomor-67-tahun-2021-tentang-penanggulangan-tuberkulosis/

<https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kasus-tbc-tinggi-karena-perbaikan-sistem-deteksi-dan-pelaporan>

<https://data.worldbank.org/indicator/SH.TBS.INCD?locations=ID>